

**PENEMPATAN ATASE PERTAHANAN INDONESIA DI FIJI DALAM
MEMPERKUAT STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN
DI KAWASAN PASIFIK SELATAN**

Oleh

Constantya Astrid Permata Sari¹⁾, Makarim Wibisono²⁾, Tahan Samuel L. Toruan³⁾

^{1,2,3}Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: [1constantyastrid@gmail.com](mailto:constantyastrid@gmail.com)

Abstract

There are several challenges emerging from the South Pacific Region. Raising support related to the issue of separatism in West Papua is the challenge that most threatens national defense and Indonesia's national interest, namely maintaining territorial integrity and the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Various diplomatic efforts, including defense diplomacy, have been carried out by Indonesia with countries in the South Pacific Region to strengthen relations and eliminate misperceptions which will eventually lead to mutual trust. This qualitative research method aims to explain how the placement of the Indonesian Defense Attaché in Fiji at the end of 2018 can strengthen Indonesia's defense diplomacy strategy in the South Pacific Region. The placement of a Defense Attache is a form of activity in defense diplomacy. Through the existence of defense attaches, it is easier for Indonesia to gather information, conduct dialogue, promotion, and negotiation in the defense sector with these countries.

Keywords: Defense Attache, Defense Diplomacy, Indonesia, Fiji, South Pacific

PENDAHULUAN

Kepentingan nasional merupakan dasar bagi sebuah negara dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara yang lain. Pada jaman ini, suatu negara membutuhkan bantuan dari negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Semakin kuatnya arus globalisasi dan demokratisasi membuat tingkat ketergantungan satu negara dengan negara lainnya semakin tinggi. Kini sangat jarang ditemui suatu negara yang dapat memenuhi seluruh kepentingan nasionalnya tanpa adanya jalinan kerja sama dengan negara lain. Untuk dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain maka diperlukan pula upaya diplomasi yang baik. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tertulis bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila

(Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, p.26).

Kawasan Pasifik Selatan menjadi wilayah yang cukup diminati oleh beberapa negara besar. Salah satu dari negara tersebut adalah China. Hubungan antara negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan China yang sudah terjalin sejak era Perang Dingin melalui perdagangan dan juga bantuan keuangan kini menjadi semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya baik dalam sektor ekonomi maupun pertahanan milik China. Semakin kuatnya pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan dapat dilihat dari berpindahnya dukungan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dari Taiwan ke China. Salah satu hal yang cukup menggemparkan adalah adanya bantuan pinjaman dana yang diberikan oleh China kepada Vanuatu untuk membangun dermaga. Total pinjaman yang diberikan untuk membangun Dermaga Luganville tersebut mencapai sekitar 93.4 juta dolar Amerika

diberikan sebagai pinjaman lunak dengan bunga 2% dan dengan waktu pembayaran selama 22 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun. Pembangunan dermaga ini juga dikerjakan oleh perusahaan China yaitu *Shanghai Construction Group*. Pembangunan ini kemudian memunculkan isu akan digunakannya Dermaga Luganville sebagai pangkalan militer China. Isu ini kemudian memunculkan kekhawatiran beberapa pihak karena dianggap akan semakin memperkuat pengaruh China di kawasan tersebut.

Australia merupakan negara yang cukup berpengaruh di kawasan Pasifik Selatan sejak dahulu. Seakan tidak ingin pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan menghilang, Australia kemudian menjalin kerja sama dengan Papua Nugini untuk membangun *Lombrum Naval Base* di Pulau Manus, Papua Nugini. Pembangunan yang diperkirakan mencapai hingga 175 juta dolar Amerika Serikat ini dapat membantu Papua Nugini untuk meningkatkan jumlah personel militernya hingga mencapai 400 orang untuk ditempatkan di *Lombrum Naval Base* tersebut. Pembangunan ini juga akan dibantu oleh pihak Amerika Serikat. Pembangunan *naval base* yang bekerja sama dengan Australia dan Amerika Serikat ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan adanya personel militer dari kedua negara tersebut yang ditempatkan di sana. Letak Pulau Manus yang tidak jauh dari wilayah NKRI menjadikan kerja sama pembangunan *naval base* ini sebagai tantangan bagi pertahanan dan keamanan Indonesia.

Menjaga tetap tegaknya NKRI merupakan kepentingan nasional Indonesia yang berlaku sepanjang masa dimana kita tidak akan pernah membiarkan sedikitpun wilayah negara ini tercerai-berai maupun dikuasai oleh pihak manapun. Demi menjaga tetap tegaknya NKRI ini kini juga dapat semakin mudah dilakukan apabila ada hubungan yang baik dengan negara lain, terutama dengan negara-negara sekitar. Adanya hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar dapat

memperkecil kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Ancaman terhadap tetap tegaknya NKRI tidak hanya berasal dari luar saja namun juga dari dalam negeri ataupun gabungan dari keduanya, seperti ancaman Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang menuntut lepasnya Papua Barat dari kedaulatan NKRI.

KST Papua yang menamai kelompoknya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Barat ini masih terus berusaha untuk dapat melepaskan diri dari kedaulatan NKRI. Mereka tidak hanya melakukan manuver dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri. Benny Wenda, pemimpin mereka yang berhasil melarikan diri setelah ditangkap pada 6 Juni 2002, berusaha menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Benny Wenda berhasil melarikan diri ke Papua Nugini dan dengan bantuan dari organisasi non-pemerintah asal Eropa kemudian memperoleh suaka politik dari Inggris (Aji, 2018). Benny Wenda kemudian berusaha mendekati organisasi di kawasan Pasifik Selatan seperti *Pacific Islands Forum* (PIF) dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) karena masyarakat Papua Barat mayoritas memiliki ras Melanesia seperti negara-negara di kawasan tersebut.

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi sub-regional yang terdiri dari negara-negara yang masuk dalam wilayah Melanesia. 'Agreed Principles of Cooperation among Independent States of Melanesia' yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1988 di Port Vila merupakan dasar dari dibentuknya MSG. Negara-negara yang menjadi anggota dari MSG antara lain Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan juga Vanuatu. Kesekretariatan MSG yang berkedudukan di Port Vila, Vanuatu ditetapkan pada saat KTT ke-16 di Goroka, Papua Nugini tanggal 19 Agustus 2005 dan baru diresmikan pada KTT ke-17 tahun 2008. Kesepakatan yang berjudul 'Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group'

menetapkan MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional, telah ditandatangani pada 23 Maret 2007.

Pada KTT ke-19 tanggal 13-21 Juni 2013, Dr. Otto Ondawame yang merupakan Wakil Ketua *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam kesempatan tersebut, Ondawame juga sekaligus mengajukan proposal keanggotaan WPNCL dalam MSG dengan status sebagai anggota tetap (Maula, 2019, p.90). Pengajuan proposal untuk menjadi anggota tetap dalam MSG ini ditolak karena dianggap belum cukup merepresentasikan suara Papua (Poling, 2015). Kemudian WPNCL mencoba kembali untuk dapat bergabung dalam MSG setelah berkoalisi dengan beberapa faksi politik yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat serta mengubah namanya menjadi *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Pada tahun 2015, ULMWP diterima masuk oleh MSG dengan status sebagai observer. Indonesia sendiri juga masuk ke dalam MSG sebagai observer dan kemudian ditingkatkan menjadi *associated member*.

ULMWP ini berhasil mendapatkan simpati dari beberapa negara di Kawasan Pasifik Selatan. Terdapat enam negara di Kawasan Pasifik Selatan yang memberikan dukungan terhadap pisahnya Papua Barat dari Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Vanuatu, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, dan Nauru. Negara-negara ini beberapa kali mengangkat isu Papua Barat dalam pertemuan tingkat tinggi forum regional maupun internasional. Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2016, ke-enam negara ini mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan terkait dengan isu separatisme Papua Barat. Bahkan, Presiden Kepulauan Marshall juga mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat (CNN Indonesia, 2021).

Berbagai macam upaya diplomasi telah dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan tersebut. Sahanda (2020, hal. 35-38) menyebutkan berbagai macam pendekatan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan, yaitu:

- a. Indonesia membantu Fiji dalam transformasi pemerintahan dari rezim militer menjadi demokrasi serta memberi bantuan teknis di beberapa bidang lainnya setelah kudeta di Fiji tahun 2006.
- b. Indonesia bantu kembangkan *Pacific Islands Development Forum* (PIDF) yang dibentuk Fiji.
- c. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan atas bencana Topan Winston yang menimpa Fiji di tahun 2016 serta bencana Topan Pam yang menimpa Vanuatu di tahun 2015.
- d. Indonesia melakukan pendekatan melalui bidang sosial dengan memberikan pelatihan, beasiswa, pembangunan, dan lain-lain.

Dalam bidang pertahanan sendiri Indonesia sudah menjalin kerja sama pertahanan dengan Fiji dan Papua Nugini. Program beasiswa yang diberikan oleh Indonesia tidak hanya beasiswa untuk mempelajari bahasa, seni budaya, adat istiadat dan kearifan lokal Indonesia saja tetapi ada pula beasiswa bidang pertahanan yang diberikan untuk personil militer dan polisi di negara-negara tersebut.

Penempatan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji merupakan salah satu bentuk diplomasi dalam bidang pertahanan. Melalui penempatan atase pertahanan di suatu negara, maka Indonesia dapat menerima informasi mengenai keadaan di negara yang menjadi jangkauan tugas dari atase pertahanan tersebut terutama negara tuan rumah. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan/atau strategi yang akan dilaksanakan tentunya untuk memenuhi

kepentingan nasional. Peluang untuk meningkatkan tercapainya strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan menjadi semakin tinggi dengan adanya penempatan atase pertahanan Indonesia di Fiji. Tercapainya strategi diplomasi pertahanan ini tentunya akan meningkatkan kemakmuran serta stabilitas keamanan di kawasan. Akan tetapi, selain peluang tentu saja terdapat kendala maupun tantangan dalam meningkatkan tercapainya strategi diplomasi pertahanan tersebut.

LANDASAN TEORI

Pertahanan negara

Definisi dari pertahanan negara sendiri di Indonesia telah tertuang dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Definisi pertahanan negara dalam undang-undang tersebut tercantum pada pasal 1 poin 1 yang berbunyi “pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Lebih lanjut, pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan system pertahanan negara.

Hoppe (2003) menyatakan bahwa keinginan untuk mengontrol apa yang memiliki nilai seperti orang dan propertinya merupakan motivasi untuk melakukan sebuah agresi oleh karena itu pemberian jaminan keamanan harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik dari pemilik properti. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam menyusun pertahanan negara, maka harus memperhatikan kondisi dari negara tersebut seperti kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki. Melalui berbagai penjelasan tersebut, sintesis dari pertahanan negara adalah sebagai segala usaha guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman, yang diselenggarakan serta disiapkan oleh pemerintah secara dini dengan memperhatikan kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki.

Kepentingan Nasional

Morgenthau (1985, sebagaimana dikutip dalam Burchill, 2005, p.35) menjelaskan bahwa asumsi realis mengenai kunci dari konsep kepentingan didefinisikan sebagai ‘*power*’ adalah sebagai kategori objektif yang berlaku universal dan merupakan esensi dari politik. Melindungi identitas fisik, politik, dan budaya negara dari gangguan negara lain merupakan kepentingan nasional dari setiap negara (Morgenthau, 1985, sebagaimana dikutip dalam Burchill, 2005, p.37).

Pendapat lain mengenai konsep kepentingan nasional berasal dari Krasner (1978, sebagaimana dikutip dalam Nincic, 1999, p.41), yaitu sebagai suatu hal yang berkaitan langsung dengan tujuan serta perilaku negara (pemerintah) seperti yang tertuang dalam kebijakan yang diambilnya di mana kebijakan tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan tujuan umum nasional (bukan kelompok maupun individu tertentu). Apabila kepentingan nasional merupakan hal yang berkaitan dengan tujuan umum nasional maka dapat diasumsikan bahwa kepentingan nasional tersebut berasal dari mandat masyarakat negara tersebut.

Dari berbagai penjelasan mengenai konsep kepentingan nasional yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah esensi dari politik yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan berdiplomasi demi mencapai kesejahteraan bersama bukan kelompok maupun individu tertentu. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tertulis bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, p.26).

Diplomasi Pertahanan

Supriyatno mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai cara mengelola hubungan internasional dua negara dengan menggunakan negosiasi yang khusus mengkaji bidang pertahanan (Supriyatno, 2014, p.158). Menurut Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan adalah *“the peacetime use of armed forces and related infrastructure (primarily defense ministries) as a tool of foreign and security policy and more specifically the use of military cooperation and assistance”* (p.6). Menurut Idil Syawfi (sebagaimana dikutip dalam Multazam, 2010), diplomasi pertahanan memiliki tiga karakteristik utama, antara lain:

- a. *Defense diplomacy for confidence building measures* dilakukan untuk membangun hubungan baik antar negara, menurunkan ketegangan dan mispersepsi, saling terbuka dan transparan dalam mengembangkan kapabilitas militernya sehingga pihak lain tidak menganggapnya sebagai ancaman dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar negara.
- b. *Defense diplomacy for defense capabilities* bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan suatu negara dalam menghadapi ancaman potensial. Hal ini berkaitan dengan kerja sama di bidang pertahanan seperti latihan bersama, ekspor-impor alutsista, pendidikan dan pertukaran personil militer.
- c. *Defense diplomacy for defense industry* bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan industry pertahanan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama di bidang industry pertahanan, transfer teknologi, pemberian

lisensi, dan investasi dalam industri pertahanan.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, maka sintesis dari konsep diplomasi pertahanan yaitu cara mengelola hubungan internasional dua negara pada masa damai dengan menggunakan angkatan bersenjata dan kementerian atau lembaga terkait bidang pertahanan sebagai sarana untuk mengurangi dan mencegah konflik dengan negara lain, menjalin hubungan dengan musuh potensial serta mempromosikan hubungan sipil-militer guna mencapai kepentingan nasional. Penempatan atase pertahanan juga merupakan salah satu dari bentuk-bentuk kegiatan diplomasi pertahanan. Lebih lengkapnya lagi, Cottey dan Forster (2004, p.7) menjabarkan sebanyak sembilan macam bentuk kegiatan diplomasi pertahanan antara lain:

- a. Kerja sama bilateral dan multilateral antara perwira senior dan pejabat sipil dari kementerian pertahanan;
- b. Penempatan atase pertahanan di negara-negara sahabat;
- c. Pelatihan terhadap perwira militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata;
- d. Pemberian keahlian dan saran pada control angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer;
- e. Kontak dan pertukaran antara personel militer dan unit serta kunjungan kapal perang;
- f. Penempatan personel militer atau sipil di negara-negara mitra kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata;
- g. Penugasan untuk latihan;
- h. Penyediaan peralatan militer dan bantuan militer lainnya;
- i. Latihan militer bilateral dan multilateral untuk tujuan pelatihan.

Atase Pertahanan

Atase Pertahanan merupakan anggota dari angkatan bersenjata yang berperan sebagai

representasi pembangunan pertahanan sebuah negara di luar negeri. Atase pertahanan bekerja di kedutaan sehingga memiliki status dan kekebalan diplomatik (DCAF/Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 2007, p.1). Atase pertahanan sendiri merupakan istilah yang mencakup seluruh matra dari angkatan bersenjata. Akan tetapi terdapat beberapa negara yang menempatkan atase sebagai representasi dari masing-masing matra misalnya atase udara ataupun atase laut. Indonesia sendiri juga melakukan hal serupa, salah satu contohnya adalah di KBRI Bangkok yang memiliki atase pertahanan serta atase laut dan atase udara. Atase pertahanan sendiri merupakan instrumen dalam diplomasi pertahanan suatu negara karena salah satu kegiatan dari diplomasi pertahanan itu sendiri adalah penempatan atase pertahanan.

Atase Pertahanan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah perwakilan TNI yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan. Atase pertahanan ini tentunya memiliki peran-peran tertentu misalnya: 1) merupakan advokat bagi kepentingan militer serta keamanan negaranya; 2) merepresentasikan otoritas militer negaranya dan menghubungkan dengan otoritas militer di negara tuan rumah; 3) menyediakan kebijakan keamanan dan jaringan militer yang mampu beroperasi di saat hubungan bilateral bermasalah ataupun menurun; 4) bertindak sebagai penasihat militer dan/atau keamanan untuk Duta Besar dan stafnya; 5) mengamati keadaan di negara tuan rumah dengan memperhatikan keamanan serta melaporkannya kepada otoritas di negara asal; 6) mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang penjangkauan militer, diplomasi pertahanan dan kerja sama keamanan, baik dalam pertukaran bilateral ataupun program multilateral; 7) mempromosikan pertahanan negara asal misalnya saja industri

pertahanannya; dan 8) dapat juga memainkan peran dalam memelopori respon darurat serta upaya bantuan ketika dihadapkan pada krisis (DCAF, 2007, p.2-3).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan terhadap 4 narasumber yaitu Atase Pertahanan Indonesia di Fiji, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Triangulasi data digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan pengecekan data yang didapat melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*) pada narasumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tantangan yang muncul dari Kawasan Pasifik Selatan antara lain pembangunan *Lombrum Naval Base* Papua Nugini yang bekerja sama dengan Australia dan Amerika Serikat, isu akan digunakannya Dermaga Luganville Vanuatu sebagai pangkalan militer China, serta upaya penggalangan dukungan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terkait isu separatisme Papua Barat. Pembangunan *Lombrum Naval Base* menurut BAIS TNI merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Papua Nugini dengan Australia. Walaupun memiliki jarak yang cukup dekat dengan Indonesia, akan tetapi pihak Papua Nugini dan Australia menekankan bahwa niat pembangunan tersebut adalah

.....

sebagai kerja sama untuk meningkatkan kapasitas Papua Nugini dan tidak mengarah pada upaya agresi maupun mengancam negara lain. Pembangunan ini juga dapat dianggap sebagai salah satu bagian dari strategi Amerika Serikat terkait dengan persaingannya dengan China. Hal tersebut juga berlaku untuk pembangunan Dermaga Luganville di Vanuatu. Menurut BAIS TNI hingga saat ini Vanuatu menyatakan bahwa dermaga tersebut merupakan pengelolaan pelabuhan oleh China, bukan pangkalan militer. Jarak dermaga tersebut juga relatif jauh dengan Indonesia bahkan lebih dekat dengan Australia sehingga tidak akan menjadi potensi ancaman langsung bagi Indonesia.

Pihak
Kemenkopolhukam menyampaikan bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan China ada dimana-mana. Meningkatnya perekonomian dan pengaruh China di dunia tentu menimbulkan persaingan dengan Amerika Serikat serta Eropa yang sudah sejak dahulu dikenal sebagai produsen di pasaran. Menurut Kemenkopolhukam, oleh karena persaingan itu maka Amerika Serikat akan berusaha untuk turut campur terhadap sumber daya yang dicari oleh China. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji, beranggapan bahwa pembangunan Dermaga Luganville di Vanuatu merupakan upaya memperpanjang perekonomian China. Pihak Kemhan juga menyatakan bahwa pembangunan Dermaga Luganville di Vanuatu tidak memiliki dampak secara pertahanan namun dapat dikhawatirkan dengan semakin kuatnya pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan, China dapat bermain politik dengan negara-negara tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Atase Pertahanan Indonesia di Fiji bahwa China mulai menguasai beberapa negara di kawasan ini melalui perpanjangan ekonomi tersebut. Salah satu contoh permainan politik yang dikhawatirkan dapat dilakukan kepada Indonesia di masa depan adalah Kepulauan Solomon yang memutuskan hubungannya dengan Taiwan karena pengaruh China.

Dari semua tantangan tersebut, seluruh narasumber menyatakan bahwa penggalangan dukungan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terkait isu separatisme di Papua Barat merupakan tantangan yang paling berpengaruh terhadap pertahanan negara dan kepentingan nasional Indonesia. Pihak Kemhan menyatakan bahwa walaupun negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tersebut kecil, namun dalam forum mereka tetap memiliki satu suara, sama dengan negara-negara besar lainnya. Pihak BAIS TNI menyatakan bahwa upaya penggalangan dukungan ini dapat menjadi potensi ancaman dari aspek pertahanan secara langsung karena masih ada negara-negara yang mendukung pisahnya Papua dari NKRI, terutama Vanuatu. Negara ini memiliki undang-undang *Wantok Blong Yumi* yang menyatakan bahwa bangsa Vanuatu belum akan merasa merdeka sepenuhnya apabila bangsa Melanesia yang lainnya belum merdeka. Walaupun undang-undang ini tidak relevan apabila digunakan dalam isu Papua Barat karena Papua memang bagian dari kesatuan NKRI, namun hal ini dikhawatirkan dapat digunakan sebagai *manuver* politik Vanuatu terhadap bangsa Melanesia yang lain. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji juga menyampaikan bahwa ancaman yang muncul dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tidak serta merta militer namun lebih pada integritas kedaulatan NKRI. Pihak Kemenkopolhukam menyatakan bahwa tantangan bersifat politis yang muncul dari kawasan Pasifik Selatan adalah mengenai isu disintegrasi Papua.

Pertahanan negara adalah segala usaha guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman, yang diselenggarakan serta disiapkan oleh pemerintah secara dini dengan memperhatikan kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan kepentingan nasional merupakan sebuah esensi dari politik yang digunakan sebagai dasar

dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan berdiplomasi demi mencapai kesejahteraan bersama bukan kelompok maupun individu tertentu. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tertulis bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Konsep pertahanan negara dan kepentingan nasional Indonesia sesungguhnya memiliki satu kesamaan yaitu menjaga keutuhan atau tegaknya wilayah negara.

Penggalangan dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua Barat membuat diangkatnya isu tersebut dalam forum antar-negara baik di tingkat kawasan seperti MSG dan PIF serta tingkat dunia seperti PBB. Tantangan ini memang harus terus diawasi perkembangannya dan juga dilakukan penanggulangan terhadapnya karena apabila banyak dari negara di kawasan Pasifik Selatan yang memberikan dukungan terhadap isu separatisme Papua Barat maka dikhawatirkan bahwa penggalangan dukungan ini akan melebar ke negara-negara yang lainnya. Sekecil apapun suatu negara, mereka memiliki satu suara yang sama dengan negara-negara besar lainnya dalam forum internasional.

Pendekatan kepada negara-negara Pasifik Selatan sudah dilakukan oleh Indonesia. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan diplomasi publik daripada diplomasi pertahanan. Diplomasi publik yang dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan ketika ada negara di Kawasan Pasifik Selatan yang tertimpa bencana. Pendekatan lain adalah dengan diberikannya berbagai pelatihan keterampilan dan beasiswa pendidikan kepada warga negara di Kawasan Pasifik Selatan. Pihak Kemenkopolhukam menyatakan bahwa strategi *Pacific Engagement* dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan setempat masing-masing negara di Kawasan Pasifik Selatan dilaksanakan oleh berbagai

kementerian. Pihak Kemenkopolhukam sendiri memberikan bantuan melalui Rapat Koordinasi Paipurna Tingkat Menteri (RPTM) dengan memanggil semua instansi yang terkait apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan strategi *Pacific Engagement* tersebut. Pihak Kemhan juga menyatakan bahwa pendekatan ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan dilakukan melalui berbagai dimensi di Kementerian/ Lembaga. Pihak BAIS TNI menyatakan bahwa negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan cukup bergantung pada bantuan sehingga Indonesia sering mengirimkan bantuan baik untuk penanggulangan bencana, pendidikan maupun pelatihan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Pendekatan yang diberikan dalam bentuk bantuan kemanusiaan oleh Indonesia ke negara-negara Pasifik Selatan, misalnya pada tahun 2015 diberikan kepada Vanuatu ketika diperpa Badai Pam, pada tahun 2016 diberikan kepada Fiji yang diterpa Topan Winston, dan pada tahun 2020 diberikan kepada Fiji yang diterpa Topan Harold. Kemudian pendekatan dalam bentuk pelatihan misalnya saja pada tanggal 18-22 Maret 2019, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pelatihan pelaku bisnis yang diikuti oleh 21 orang pelaku bisnis dari Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Indonesia (Pramudyani, 2019). Pada tanggal 22-28 Juli 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengadakan Pelatihan Internasional Penangkapan Ikan di Pesisir dan Teknik Pengolahan Ikan yang diikuti oleh peserta dari negara Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini serta Timor Timur (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019). Kemudian pada November 2019, Indonesia mengirimkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan di Fiji dan Kepulauan Solomon dengan tajuk "*International Training on Aquaculture Product Development for Fiji and Solomon Islands*" (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Untuk pendekatan melalui pemberian beasiswa pendidikan, Sahanda (2020, hal. 57-64) menjelaskan jenis-jenis beasiswa serta partisipasi dari negara-negara Pasifik Selatan sebagai berikut:

- a. Darmasiswa, beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bagi mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa, seni dan budaya Indonesia selama satu tahun. Dari tahun 2015 hingga 2020 tercatat partisipasi dari negara Fiji berjumlah 6 orang, Papua Nugini berjumlah 42 orang, serta Kepulauan Solomon berjumlah 3 orang.
- b. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menawarkan beasiswa program magister bertujuan untuk meningkatkan *cultural understanding* dan hubungan kerja sama antara negara-negara berkembang.
- c. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk tinggal selama 3 bulan di tengah masyarakat Indonesia di beberapa provinsi dan mempelajari Bahasa Indonesia, seni budaya, adat istiadat serta kearifan lokal. Dari tahun 2003 hingga 2019 tercatat Fiji berpartisipasi sebanyak 17 kali, Papua Nugini sebanyak 14 kali, Kepulauan Solomon 12 kali, Kiribati 12 kali, Vanuatu 11 kali, Tonga 9 kali, Tuvalu 9 kali, Samoa 7 kali, Kaledonia Baru 6 kali, Kepulauan Cook 4 kali, dan Palau 3 kali.

Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia juga menawarkan beasiswa pendidikan bagi personil militer dan polisi dari negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Pada tahun 2018, salah satu anggota militer Fiji

menjadi Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-56 (Radar Indonesia, 2018). Pada tahun yang sama pula, Fiji mengirimkan salah satu pejabat tinggi kepolisian mereka untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII di Lemhannas RI (Lemhannas RI, 2018). Akan tetapi, rata-rata personil militer maupun kepolisian yang mengikuti program ini adalah perwira senior. Sebaiknya beasiswa pendidikan di bidang pertahanan dan keamanan diberikan lebih banyak kepada perwira junior yang masih memiliki masa tugas lebih Panjang sehingga ilmu yang didapat dapat langsung dipraktikkan maupun dibagikan kepada personil di negara asal. Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) adalah universitas di bidang ilmu pertahanan yang berada di bawah Kemhan RI. Terdapat beberapa program studi yang cocok bagi personil militer negara Pasifik Selatan yaitu Keamanan Maritim, Strategi Pertahanan Laut dan Manajemen Bencana. Pemerintah Indonesia dapat menawarkan perwira junior baik dari militer maupun kepolisian di negara-negara Pasifik Selatan untuk menempuh pendidikan di UNHAN RI.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memang banyak yang tidak memiliki angkatan bersenjata (militer). Kebanyakan dari mereka hanya memiliki angkatan kepolisian yang juga mencakup sebagai *maritime surveillance unit*. Negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki angkatan bersenjata (militer) antara lain Papua Nugini, Fiji, dan Tonga. Selain memiliki angkatan kepolisian, Vanuatu juga memiliki angkatan paramiliter yaitu *Vanuatu Mobile Force* yang dilengkapi dengan persenjataan kecil. Sedangkan untuk Kaledonia Baru, memiliki pasukan militer dari Perancis. Negara-negara yang lainnya cenderung mendapatkan bantuan pertahanan dari negara besar lainnya seperti Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Hal ini menjadi kendala bagi upaya diplomasi

pertahanan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan.

Diplomasi pertahanan yaitu cara mengelola hubungan internasional dua negara pada masa damai dengan menggunakan angkatan bersenjata dan kementerian atau lembaga terkait bidang pertahanan sebagai sarana untuk mengurangi dan mencegah konflik dengan negara lain, menjalin hubungan dengan musuh potensial serta mempromosikan hubungan sipil-militer guna mencapai kepentingan nasional. Kerja sama pertahanan merupakan salah satu bentuk dari diplomasi pertahanan. Indonesia sendiri memiliki perjanjian kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini dan Fiji. Penempatan Atase Pertahanan Indonesia juga merupakan bagian dari diplomasi pertahanan, yaitu kegiatan penempatan personel militer atau sipil di negara-negara mitra kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan dilakukan untuk *confidence building measures*. Diplomasi ini dilakukan untuk membangun hubungan baik antar negara, menurunkan ketegangan dan mispersepsi, saling terbuka dan transparan dalam mengembangkan kapabilitas militernya sehingga pihak lain tidak menganggapnya sebagai ancaman dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar negara. Dalam hal ini Indonesia berupaya untuk membangun hubungan baik dan menurunkan mispersepsi mengenai isu Papua Barat dari negara-negara Pasifik Selatan.

. Indonesia baru menempatkan Atase Pertahanan di Fiji pada akhir tahun 2018. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji ini juga merangkap negara Tuvalu, Nauru, dan Kaledonia Baru. Pihak Kemenkopolkum menyatakan bahwa dengan adanya atase pertahanan maka tidak hanya fungsi politik di KBRI saja yang berjalan namun juga fungsi pertahanannya. Pihak Kemhan menyatakan bahwa atase pertahanan akan bekoordinasi dengan KBRI untuk menyukseskan program pemerintah di wilayah

tersebut terutama yang berhubungan dengan pertahanan. Selain itu guna melihat peningkatan strategi diplomasi pertahanan melalui penempatan atase pertahanan maka dikumpulkan data mengenai pencapaian-pencapaian oleh Atase Pertahanan Indonesia di Fiji. Pihak Kemhan menyatakan bahwa dengan adanya Atase Pertahanan Indonesia di Fiji membuat hubungan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Fiji menjadi semakin dekat. Pihak Kemhan dan BAIS TNI menyatakan bahwa kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Fiji ke Indonesia adalah hasil usaha dari atase pertahanan. Pihak BAIS TNI menambahkan bahwa Atase Pertahanan Indonesia di Fiji membantu memfasilitasi kunjungan BNPB dalam memberikan pelatihan di Fiji serta turut membantu dalam penyebaran informasi positif mengenai Papua.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Delegasi Pemerintah Fiji Samuela Karavaki Vuentaki yang berdinas di Kementerian Pertahanan Fiji berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuan dari kedatangan beliau adalah untuk mempelajari mekanisme dalam merespon situasi darurat di Indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk penguatan penanggulangan bencana di Fiji (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019). Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2019, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Fiji, Captain (N) Humphrey Biutilomaloma Tawake mendarat di Jakarta lalu kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi PT. PAL Indonesia di Surabaya. Pada saat di Jakarta, Kasal Fiji berkunjung ke Markas Besar TNI Angkatan Laut di Cilangkap dan disambut oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Sedangkan ketika Kasal Fiji dan rombongan tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2019, Kasal Fiji disambut oleh Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Asops Danlantamal V) Kolonel Laut (P) Agus Prabowo Adi, S.E., yang kemudian akan

mendampingi dalam kunjungan ke PT. PAL Indonesia. Kasal Fiji sendiri juga didampingi oleh Atase Pertahanan Indonesia untuk Fiji Kolonel Inf Efran Gunawan dan Delegasi Angkatan Laut Fiji yang lain yaitu *Maritime Officer, Commander* Ledua Yaco, serta Duta Besar Fiji di Indonesia Mr. Naivalucava Vilikesa Ratubulewal (Pusat Penerangan TNI, 2019).

Dalam kunjungannya ke PT. PAL Indonesia, Captain (N) Humphrey Biutimaloma Tawake beserta rombongannya disambut oleh Direktur Utama PT. PAL Indonesia yaitu Bapak Budiman Saleh. Mereka mengunjungi beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. PAL Indonesia, seperti Alugro yang sedang melaksanakan HAT (*Harbour Acceptance Test*), pemasangan sistem senjata pada KRI RE Martadinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai, Kapal Perusak Kawal Rudal, serta pembuatan Kapal Bantu Rumah Sakit di Workshop Assembly Divisi Kapal Niaga. Karena Fiji memiliki kesamaan dengan Indonesia mengenai kebutuhan dalam pengamanan teritorial, kapal komando, dan misi kemanusiaan, Kasal Fiji sangat berminat pada Kapal OPV 60 M dan LPD 124 M buatan PT. PAL Indonesia (Departemen Humas PT PAL Indonesia, 2019). Pihak Fiji kemudian Kembali mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti PPRRA LX di Lemhannas RI yang berlangsung selama 7 bulan pada tahun 2020 (Lemhannas RI, 2020). Hal ini merupakan contoh dari kegiatan pelatihan terhadap perwira militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata.

Kepada Atase Pertahanan Indonesia di Fiji, penulis tidak menanyakan mengenai pencapaian dari atase pertahanan tersebut. Penulis menanyakan mengenai perkembangan dari kerja sama pertahanan Indonesia dengan Fiji setelah ditandatanganinya *Defence Cooperation Agreement* pada tahun 2017. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji menyampaikan bahwa pada tahun 2019 terdapat beberapa perwakilan Kementerian

Pertahanan Fiji yang melakukan kunjungan untuk studi banding ke BNPB serta kunjungan Kasal Fiji ke Jakarta. Kunjungan ini kemudian dibalas dengan kunjungan dari Kepala BAIS TNI ke Fiji pada Juli 2019 dan delegasi Markas Besar TNI AD ke Fiji pada Agustus 2019. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji juga menambahkan bahwa tahun 2019 terdapat satu siswa Lemhannas RI dari Fiji sehingga memiliki total 5 alumni Lemhannas dan 2 alumni Seskoal.

Penempatan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji semakin memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan. Peran-peran tertentu dari Atase Pertahanan menurut DCAF seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian landasan teori di atas adalah: 1) merupakan advokat bagi kepentingan militer serta keamanan negaranya; 2) merepresentasikan otoritas militer negaranya dan menghubungkan dengan otoritas militer di negara tuan rumah; 3) menyediakan kebijakan keamanan dan jaringan militer yang mampu beroperasi di saat hubungan bilateral bermasalah ataupun menurun; 4) bertindak sebagai penasihat militer dan/atau keamanan untuk Duta Besar dan stafnya; 5) mengamati keadaan di negara tuan rumah dengan memperhatikan keamanan serta melaporkannya kepada otoritas di negara asal; 6) mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang penjangkauan militer, diplomasi pertahanan dan kerja sama keamanan, baik dalam pertukaran bilateral ataupun program multilateral; 7) mempromosikan pertahanan negara asal misalnya saja industri pertahanannya; dan 8) dapat juga memainkan peran dalam memelopori respon darurat serta upaya bantuan ketika dihadapkan pada krisis. Dari penjelasan mengenai berbagai pencapaian Atase Pertahanan Indonesia di Fiji dan perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Fiji, dapat dilihat bahwa peran-peran dari atase pertahanan tersebut telah dilaksanakan.

Mengenai kendala kerja sama pertahanan dengan negara-negara Pasifik Selatan karena tidak memiliki angkatan militer, Atase Pertahanan Indonesia di Fiji juga memberi masukan dengan menyatakan bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh TNI AL yang mungkin dapat berkolaborasi dengan POLAIR untuk mengadakan patroli bersama. Negara-negara Pasifik Selatan juga merupakan negara kepulauan seperti Indonesia sehingga sangat rawan dengan adanya *illegal fishing, smuggling, drug* atau *human trafficking*. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji menjelaskan bahwa banyak pulau-pulau tak bertuan di Pasifik Selatan yang dijadikan *drop zone* dari *drug trafficking* dari Amerika Latin untuk dipasarkan ke Australia dan Selandia Baru. Bantuan kemanusiaan yang diberikan ke negara-negara Pasifik Selatan dapat menjadi diplomasi pertahanan dengan melibatkan personil militer di dalamnya. Seperti halnya bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji di tahun 2016 setelah Fiji diterpa Topan Winston. Menurut BBC News Indonesia (2016), Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat yang akan diserahkan Sebagian secara tunai dan sebagian lainnya dalam bentuk barang yang dibawa dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut bersamaan dengan satu kompi (100 orang) Pasukan Zeni Angkatan Darat yang akan membantu pembangunan di Fiji. Pada tahun 2020 Fiji diterpa bencana Topan Harold dan Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 12.9 Ton berupa bahan makanan, minuman, handuk, selimut, tenda peleton, tenda regu, dan barang-barang lainnya yang dikirim dengan menggunakan Pesawat Hercules C130 seri A1318 milik TNI Angkatan Udara (Yahya, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Penempatan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji dapat memperkuat strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi

tantangan dari Kawasan Pasifik Selatan karena penempatan atase pertahanan sendiri merupakan bagian dari kegiatan diplomasi pertahanan. Atase Pertahanan Indonesia di Fiji sudah melaksanakan berbagai perannya seperti menjadi advokat bagi kepentingan militer serta keamanan Indonesia, merepresentasikan otoritas militer Indonesia dan menghubungkan dengan otoritas militer Fiji, menyediakan kebijakan keamanan dan jaringan militer yang mampu beroperasi di saat hubungan bilateral bermasalah ataupun menurun, bertindak sebagai penasihat militer dan/atau keamanan untuk Duta Besar dan stafnya, mengamati keadaan di Fiji dengan memperhatikan keamanan serta melaporkannya kepada otoritas di negara asal, mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang penjangkauan militer, diplomasi pertahanan dan kerja sama keamanan, dan mempromosikan pertahanan negara Indonesia misalnya industri pertahanannya.

Walaupun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan di Kawasan Pasifik Selatan berupa tidak adanya angkatan militer di semua negara Pasifik Selatan. Oleh karena itu, TNI dan Kemhan harus lebih banyak dilibatkan dalam berbagai kesempatan misalnya saja saat pemberian bantuan kemanusiaan. Kemudian dalam pemberian beasiswa pendidikan, pemerintah dapat merangkul lebih banyak personil militer maupun kepolisian dari negara-negara Pasifik Selatan untuk menempuh pendidikan di bidang pertahanan dan keamanan melalui UNHAN RI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1,9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Ed.3, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- [2] Aji, Seto, 2018, Mengenal Sosok Benny Wenda Pemimpin OPM yang Kini Hidup Enak di Luar Negeri, <https://bangka.tribunnews.com/2018/12/09/mengenal-sosok-benny-wenda->

- [pemimpin-opm-yang-kini-hidup-enak-di-luar-negeri?page=3](#) diakses tanggal 19 Mei 2019.
- [3] Maula, Zsahwa, 2019, Kepentingan Indonesai dalam Kerja Sama Pertahanan dengan Fiji, *Analisis CSIS*, vol. 48, hal 90.
- [4] Poling, Gregory B, 2015, The Upside of Melanesian Leaders' West Papua Compromise, <https://www.csis.org/analysis/upside-melanesian-leaders%E2%80%99-west-papua-compromise>, diakses tanggal 25 Juli 2019.
- [5] CNN Indonesia, 2021, 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210927171055-113-700097/6-negara-pasifik-yang-getol-singgung-isu-ham-papua-di-pbb/1>, diakses pada 29 September 2022.
- [6,19] Sahanda, Dimas Hutomo, 2020, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka. *Skripsi*, Program Sarjana Hubungan Internasional, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [7] Hoppe, Hans-Hermann, 2003, *The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security Production*, Ludwig von Mises Institute.
- [8,9] Burchill, Scott, 2005, *The National Interest in International Relation Theory*, Palgrave Macmillan.
- [10] Nincic, Miroslav, 1999, The National Intersert and Its Interpretation, *The Review of Politics*, Vol. 61, No. 1, hal 41.
- [11] Supriyatno, Makmur, 2014, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [12,14] Cottey, Andrew, dan Anthony Forster, 2004, *Reshaping Defence Diplomacy: New Role for Military Cooperation and Assistance*, Oxford University Press.
- [13] Multazam, Arifin, 2010, Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Univ. Indonesia, Jakarta.
- [14,15] DCAF/Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 2007, Defence Attaches, *DCAF Backgrounder*, July, <https://www.files.ethz.ch/isn/38583/dcaf-backgrounder-defence-attaches.pdf>
- [16] Pramudyani, Yashinta Difa, 2019, Indonesia Selenggarakan Pelatihan Bisnis bagi Negara-Negara Pasifik, <https://www.antaraneews.com/berita/815269/indonesia-selenggarakan-pelatihan-bisnis-bagi-negara-negara-pasifik>, diakses pada 23 September 2022.
- [17] Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019, Menteri Susi Buka secara Resmi Pelatihan Internasional KSST dan HLP Kejahatan di Industri Perikanan 2019, <https://kkp.go.id/artikel/12660-menteri-susi-buka-secara-resmi-pelatihan-internasional-ksst-dan-hlp-kejahatan-di-industri-perikanan-2019>, diakses pada 30 September 2022.
- [18] Kementerian Luar Negeri RI, 2019, Kirimkan Tenaga Ahli Indonesia Bantu Tingkatkan Kapasitas Pengolahan Produk Akuakultur di Kepulauan Solomon, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/762/berita/kirimkan-tenaga-ahli-indonesia-bantu-tingkatkan-kapasitas-pengolahan-produk-akuakultur-di-kepulauan-solomon>, diakses pada 18 September 2022.
- [20] Radar Indonesia, 2018, Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-56 Ikuti Seminar PKB Juang TA.2018, <http://www.radarindonesia.com/2018/09/pasis-dikreg-seskoal-angkatan-ke-56-24.html>, diakses pada 23 September 2022.
- [21] Lemhannas RI, 2018, PPRA LVIII Resmi Ditutup, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/b>

[erita/berita-utama/47-ppra-lviii-resmi-ditutup](#), diakses pada 27 Agustus 2022.

- [22] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019, Pemerintah Fiji Tindak Lanjuti Kerja Sama Penanggulangan Bencana, <https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-fiji-tindak-lanjuti-kerja-sama-penanggulangan-bencana>, diakses pada 24 September 2022.
- [23] Pusat Penerangan TNI, 2019, Asops Dantamal V Sambut Kasal Fiji dan Dampingi Kunjungan ke PT PAL Indonesia, <https://tni.mil.id/view-158328-asops-dantamal-v-sambut-kasal-fiji-dan-dampingi-kunjungan-ke-pt-pal-indonesia.html>, diakses pada 23 September 2022.
- [24] Departemen Humas PT. PAL Indonesia, 2019, Fiji Minati Produk Alutsista PT PAL Indonesia (PERSERO), <https://www.pal.co.id/2020/01/publikasi/perusahaan-kegiatan/fiji-minati-produk-alutsista-pt-pal-indonesia-persero/>, diakses pada 26 September 2022.
- [25] BBC News Indonesia, 2016, Bantu Fiji Indonesia ingin redam Gerakan Pembebasan Papua, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_fiji_papua_bantuan, diakses pada 7 Agustus 2022.
- [26] Yahya, Achmad Nasrudin, 2020, TNI Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Topan Harold ke Fiji, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/06172671/tni-kirim-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-topan-harold-ke-fiji>, diakses pada 4 September 2022.